

POLICY BRIEF

**CATATAN PENANGANAN DAMPAK
SOSIAL & EKONOMI AKIBAT COVID-19**

(Study Kasus Kota Pekanbaru)

Penulis

Aksiza Utami Putri

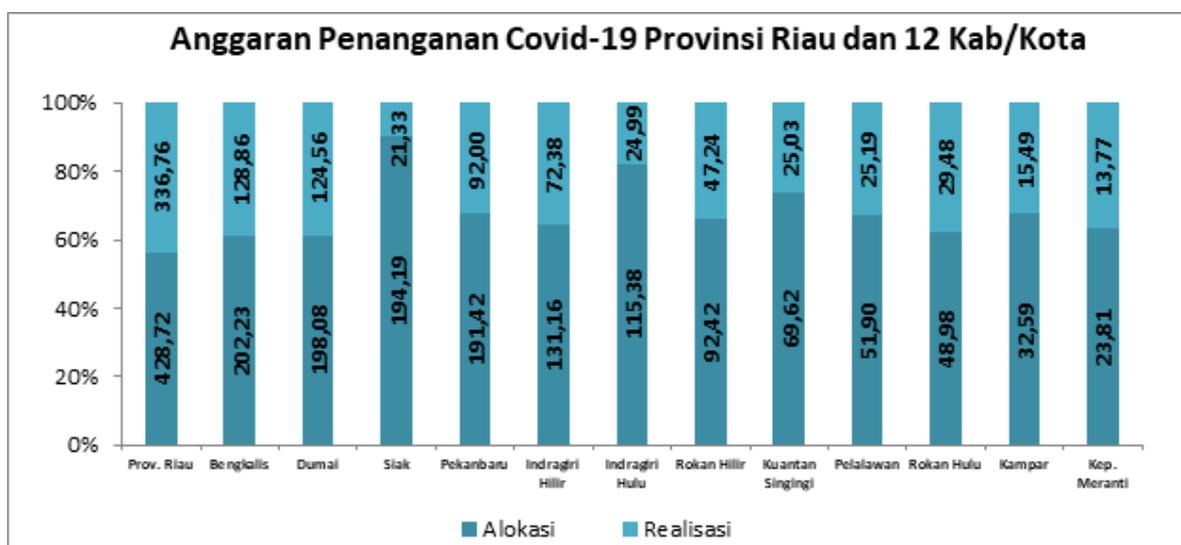
A. PENDAHULUAN

Covid-19 tidak hanya berdampak terhadap aspek kesehatan masyarakat, tetapi juga berdampak signifikan terhadap aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Persoalan ekonomi yang sudah terjadi dalam masa pembatasan social pandemi adalah banyak pekerja yang mengalami PHK, meningkatnya pengangguran dan banyak usaha masyarakat terhenti atau tutup sehingga tidak dapat menghasilkan pendapatan lagi.

Berbagai macam kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah dalam upaya mengatasi dampak social dan ekonomi. Ditingkat pusat melalui APBN 2020 pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp230,21 Triliun, dan yang sudah direalisasikan sebesar Rp217,99 Triliun atau 94,7%. Beberapa program untuk perlindungan social yang telah mencapai realisasi 100% diantaranya adalah Program Keluarga Harapan dan Bantuan Beras, Kartu Sembako dan Bantuan Tunai, Bansos Jabodetabek, Bansos Tunai Non Jabodetabek, Bantuan Subsidi Upah/Gaji, Bantuan Subsidi Upah/Gaji

Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non-PNS di Kemendikbud dan Kemenag. Selebihnya progres realisasi di klaster perlindungan sosial seperti Kartu Pra Kerja mencapai 99,5%, namun telah mencapai 5,6 juta penerima manfaat sesuai target, dan program diskon listrik mencapai 84,4%. Hanya Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang realisasinya mencapai 64,43%.

Hal serupa juga terjadi daerah, atas dasar Intruksi Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran Dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah bahwa anggaran dalampenanganan Covid-19 dimandatkan Untuk 3 bidang yaitu Bidang kesehatan, Bidang Penyediaan jaring pengaman social, dan Bidang pemulihan ekonomi. Provinsi Riau dan Kabupaten Bengkalis merupakan daerah yang mengalokasikan anggaran paling besar untuk Penanganan covid-19 sementara Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan daerah yang mengalokasikan anggaran paling kecil.



Sumber: Bina Keuangan Daerah, Kemendagri (di Olah Fitra Riau)

Setahun sudah covid19 mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi. Beragam program dan anggaran telah disalurkan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Lalu bagaimana implementasinya? Catatan ini akan mendesk-

ripsikan bagaimana implementasi program penanganan dampak sosial dan ekonomi. Menitikberatkan pada kebijakan dan program serta kasus-kasus yang ditemukan di Kota Pekanbaru.

B. CATATAN PENANGANAN DAMPAK SOSIAL & EKONOMI DI KOTA PEKANBARU

Kondisi covid-19 hingga saat ini masih terus terjadi termasuk di Kota Pekanbaru, akibatnya dampak sosial dan melemahnya ekonomi masyarakat tidak dapat dielakan, untuk mengatasi itu semua pemerintah telah memberikan stimulus ekonomi dan jaring pengaman sosial untuk masyarakat yang terdampak. Dalam pelaksanaan bantuan sosial dan pemulihan ekonomi di Kota Pekanbaru, Fitra Riau mencatat beberapa persoalan yang terjadi dalam waktu satu tahun terakhir, sebagai berikut;

1. Menutup Rapat Akses Informasi Anggaran Covid-19

Keterbukaan Informasi menjadi hal yang sangat penting untuk mewujudkan Good Governance dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, partisipatif dan akuntabilitas. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya mandate UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keterbukaan Informasi Publik dinilai menjadi factor utama dalam Penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas dan merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Berdasarkan hasil penelusuran di kanal informasi pemerintah Kota Pekanbaru, seperti website resmi dan website khusus covid-19 pemerintah Kota Pekanbaru, Fitra Riau tidak menemukan informasi yang berkaitan dengan kebijakan anggaran penanganan covid-19 termasuk informasi yang berkaitan dengan penyaluran bantuan sosial. Adapun informasi yang tersedia hanya yang berkaitan dengan Prosedur penanganan covid, protokol kesehatan dan sejumlah kebijakan penangan covid-19.

Selain itu, Fitra Riau melakukan akses informasi terkait Data Realisasi Anggran penanganan Covid -19 tahun 2020, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), KPM (Keluarga Penerima Manfaat) Bantuan Covid-19 tahun 2020 Kota Pekanbaru. Namun pemerintah Kota Pekanbaru melalui PPID tidak merespon surat Akses Informasi dan sampai saat ini tidak diberikan data sesuai yang diminta. Informasi anggaran terkait Covid-19 seharusnya penting untuk di buka ke publik dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penggunaan covid-19.

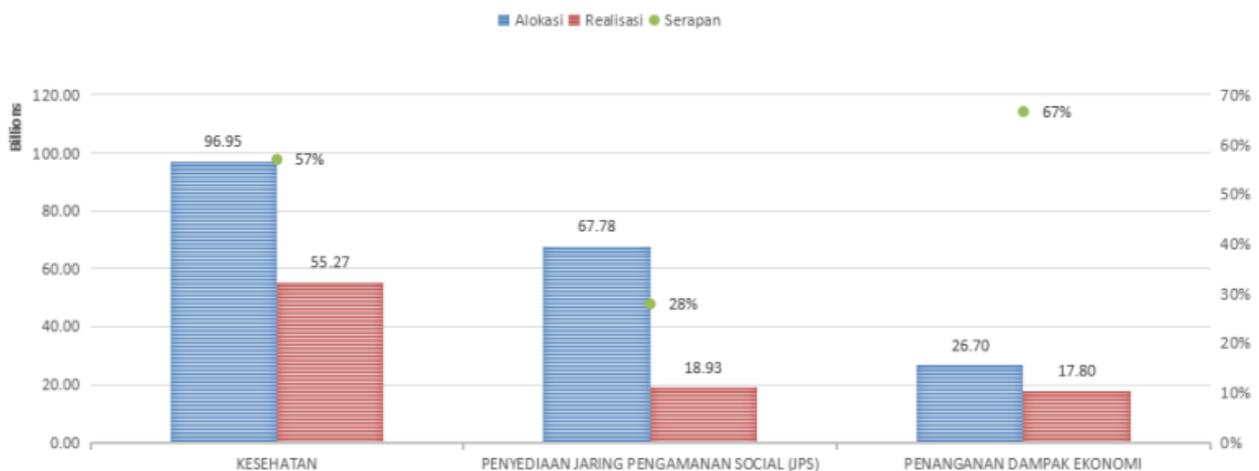
2. Central Penyebaran Covid-19, Minim Alokasi Anggaran

Kota Pekanbaru sebagai Ibu Kota Provinsi Riau adalah Daerah yang menjadi pusat penyebaran Covid-19 tertinggi dari 12 kab/kota yang ada di Provinsi Riau. per 21 Maret 2021 kasus covid-19 di Kota Pekanbaru semakin meningkat data dari <https://corona.riau.go.id/> menjelaskan suspek 12,034 jiwa konfirmasi 16,001 jiwa, sembuh 15,004 dan meninggal 337 Jiwa.

Dalam rangka penanganan covid-19, Pemerintah Kota Pekanbaru mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 191 M, dan sudah terealisasi sebesar Rp.92 M atau sama dengan

Selain itu, Pemerintah Provinsi Riau memberikan bantuan keuangan kepada Kota Pekanbaru untuk Penangan Covid yaitu berupa bantuan keuangan penanganan dampak sosial Rp.300.00/KK kepada 29.669 KK selama 2 bulan sebesar 26 M dan telah di realisasi sebesar 17 M, bantuan kelurahan 100jt/Kelurahan untuk 83 Kelurahan sebesar 8,3 M dan bantuan kecamatan 100jt/Kecamatan untuk 12 Kecamatan sebesar 1,18 milyar. Jika melihat pengelolaan anggaran untuk covid-19, terhadap penyaluran bantuan sosial/jaring pengaman

Grafik; Anggaran Penanganan Covid-19 Kota Pekanbaru

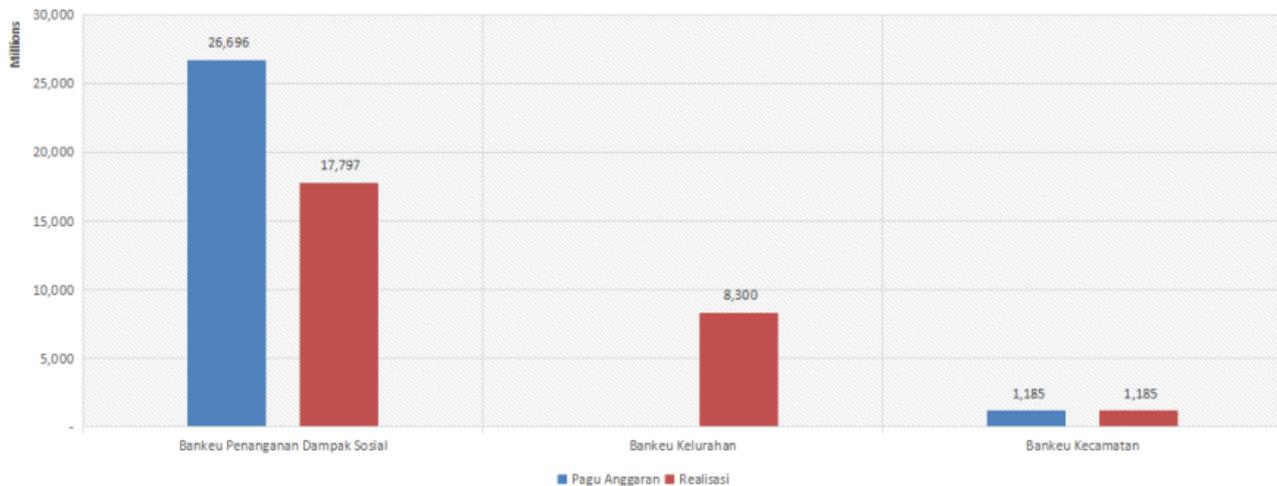


Sumber; Bina Keuangan Daerah, Kemendagri (di Olah Fitra Riau)

48,06%, alokasi terbesar digunakan untuk penanganan kesehatan mencapai Rp96 milyar, Penyediaan Jaring Pengaman Sosial sebesar Rp67 milyar dan Penanganan Dampak Ekonomi sebesar Rp26 milyar. Minimnya realisasi anggaran covid di Kota Pekanbaru sangat bertolak belakang dengan kondisi kasus yang tertinggi di Provinsi Riau. Seharusnya pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran tersebut secara maksimal termasuk untuk penanganan dampak sosial paling rendah serapannya.

sosial cenderung tidak terserap secara maksimal dan paling rendah serapannya dibandingkan dengan untuk kegiatan lainnya.

Grafik; Bantuan Pemprov Riau kepada Kota Pekanbaru untuk penanganan covid-19



Sumber; di olah BPKAD Provinsi

2. Penyaluran Bantuan Sosial untuk Covid-19 di Kota Pekanbaru

Disebabkan adanya keterbatasan informasi penanganan covid 19 di Kota Pekanbaru, khususnya terkait informasi bantuan sosial atau jaring pengaman sosial. Maka dalam catatan ini, hanya menjelaskan implementasi jaring pengaman sosial di Kelurahan Air Dingin, Marpoyan Damai.

Pelaksanaan PSBB di Kota Pekanbaru diawali

dengan adanya surat dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru nomor 460/Dinsos-Dayasos.1/321/2020. Dengan adanya PSBB maka pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat melalui data usulan penerima dari Kelurahan Air Dingin. Jumlah KK usulan penerima bansos yakni sebanyak 3.672 KK dari 8.233 KK Kelurahan Air Dingin.

Data Usulan Penerima Bansos Covid-19 di Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru

No	Data Penerima	Jumlah
1	Data Penerima CBP	234
2	Data Sisa Valid	669
3	Data DTKS	169
4	Data Tidak Lengkap	804
5	Data Prioritas Tidak Lengkap	508
6	Data Mampu	1.295
	Total	3.679

Sumber; Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru

Bantuan Stimulus Keuangan dan Sembako

Dari data usulan penerima bansos tersebut akan menerima bantuan terdampak COVID-19 dalam beberapa tahap yang direkapitulasi bantuan dalam bentuk paket sembako dari pemerintah Kota Pekanbaru yang di ambil langsung di Kelurahan Air dingin, Bantuan Langsung Tunai dari Pemerintah Provinsi

Riau sebesar Rp.300.00 Disalurkan melalui transfer Bank (Melalui Rekening). dan dari Kemensos Rp.600.000 selama 3 bulan dan di bulan selanjutnya sebesar Rp.300.000 Pengambilan Bantuan langsung di Kantor Pos dengan rincian, sebagai berikut;

No	Teknis Penyaluran	Jumlah	Tersalurkan	Tidak Tersalurkan	Kendala
1	BPR Tahap 1 (Pemerintah Provinsi Riau)	124	109	15	Tidak bisa dihubungi melalui via telepon/tidak ditemukan (11 KK), keluar kota (2 KK), sudah pisah (2 KK)
2	BRK Tahap 1 (Pemerintah Provinsi Riau)	365	241	124	Tidak bisa dihubungi melalui via telepon/ tidak ditemukan (93 KK), keluar kota (3 KK), tidak E-KTP (10 KK), salah data (8KK), sudah meninggal (3 KK), tidak ada KK asli (3 KK), alamat tidak jelas (4Kk)
3	BRK Tahap 2 (Pemerintah Provinsi Riau)	479	347	132	Tidak bisa di hubungi (132 KK)
4	Kantor Pos (Kemensos)	321	321	-	-
5	Paket Sembako Sembako Kota Pekanbaru	1.427	1.427	-	-
Jumlah		2.716	2.445	271	

Sumber: Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru

C. TEMUAN-TEMUAN IMPLEMENTASI PENANGANAN COVID-19

Dalam pelaksanaannya penanganan covid-19 di Kota Pekanbaru menyisakan beberapa permasalahan, adapun temuan-temuan implementasi penanganan dampak sosial covid-19 di Kota Pekanbaru, sebagai berikut;

1. Kurangnya sosialisasi terhadap pengelolaan dan penyaluran Bansos Covid-19

Dalam rangka penanganan covid-19, kegiatan sosialisasi seharusnya lebih dimasifkan agar seluruh masyarakat kota pekanbaru dapat menerima informasi yang utuh terkait penanganan covid-19, ketersediaan sarana

kesehatan, dan informai berkaitan dengan bantuan sosial. Fakta dilapangan ditemukan khussunya terhadap kelompok Disabilitas tidak mengetahui kapan jadwal penerimaan bansos tersebut dan tidak tahu batas pengambilan uang tunainya tersebut sehingga mengakibatkan masyarakat tidak mengambil bantuan tersebut.

Dari hasil wawancara bersama warga Kota Pekanbaru ibu Lianny, dijelaskan bahwa “pada Bulan Juni Penerimaan tahap pertama kita diberitahukan oleh petugas kelurahan melalui RT/RW dan mengambil bantuan tunai

lansung ke kantor pos, kita tidak tahu apakah tiap bulan mendapatkan atau tidak, tidak ada diberitahukan untuk pengambilan dan uangnya tidak di ambil karna tidak dapat pemberitahuan dan batas pengambilan bantuan tersebut”

2. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak diperbarui, penyaluran bansos berpotensi tidak tepat sasaran.

Sejak awal covid-19 semakin masif penyebarannya termasuk di Kota Pekanbaru, selain untuk penanganan di bidang kesehatan dampak lain yang harus di segera ditangani adalah dampak sosial ekonomi dalam rangka untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Khususnya terhadap penanganan sosial, kendala utama yang dihadapi adalah ketersediaan data yang tidak sama antara pemerintah pusat dan daerah yang mengacu pada data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), sehingga dalam penyalurannya berpotensi tidak tepat sasaran. Faktanya dalam implementasi justru masyarakat yang dalam kategori mampu mendapatkan bantuan sosial, sedangkan masyarakat yang tidak mampu dikarenakan tidak terdata dalam DTKD maka tidak mendapatkan bantuan sosial.

Dari hasil wawancara bersama warga Kota Pekanbaru Ibu. Afri menjelaskan bahwa “saya adalah masyarakat yang tidak memiliki rumah, saya masih mengontrak rumah di Tenayan Raya dan kami tidak pernah mendapatkan bantuan berupa uang tunai, namun ibu yang punya kontrakan kami dengan bangganya mengatakan bahwa mereka mendapatkan bantuan berupa uang tunai Rp.600.000. beliau punya rumah dan punya banyak kontrakan

yang bisa dikatakan masyarakat yang tergolong mampu. Saya pernah menanyakan kepada pak Rw data yang di pakai kenapa tidak tepat sasaran dan pak RW menjawab data yang di pakai masih menggunakan data lama.”

3. Pemotongan bantuan sebesar 50.000 untuk biaya administrasi.

Kepala Dinas Sosial Darius Husin mengatakan, polemik ini terkait bantuan keuangan (bankeu) yang seharusnya diberikan Rp 300.000 per kepala keluarga (KK), namun yang ditransfer ke warga hanya Rp 250.000. Itu artinya, bantuan untuk warga miskin dipotong Rp 50.000. "Nanti akan kita panggil dulu pemkotnya untuk minta klarifikasi apa benar ada pemotongan. Akan ada tim pengawasan yang akan mengawal pemberian bankeu kepada masyarakat itu," akui Darius <https://regional.kompas.com/read/2020/06/30/18212851/dinsos-riau-panggil-pemkot-pekanbaru-soal-pemotongan-bantuan-corona>

Dalam pertemuan yang dipimpin Asisten I Setdaprov Riau dan dihadiri Wakil Walikota Pekanbaru Ayat Cahyadi bersama sejumlah kepala dinas di lingkungan Pemko Pekanbaru tersebut disepakati bahwa Pemko Pekanbaru harus mengembalikan dana BLT yang sempat disunat oleh Pemko Pekanbaru sebesar Rp 50 ribu per kepala keluarga (KK).

"Setelah kita adakan pertemuan, diputuskan bahwa Pemko sudah berkomitmen mengembalikan dana sisa Rp50 ribu itu kepada warga penerima BLT terdampak Covid-19," kata Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau, Darius Husein, Rabu (1/7/2020).

<https://www.riauin.com/read-15455-2020-07-01-waduh-pemko-pekanbaru-ketahuhan-sunat-dana-bansos-covid19-rp50-ribu-per-kk>.

Namun kenyataan di masyarakat hingga pencairan bantuan tunai tahap ke 2 uang yang dipotong sebesar Rp.50.000 tidak di kembalikan kepada masyarakat, dari hasil wawancara dengan warga kota pekanbaru Bpk. Alex menjelaskan bahwa “Setelah sampai di bank petugas bank memberikan uang sebesar Rp.250.000 dan mengatakan bahwasanya uang yang Rp.50.000 untuk di buku tabungan dan bulan berikutnya baru bisa di ambil, sampai sekarang uang tersebut tidak di kembalikan.

Dan pemotongan ini tidak hanya kami saja namun rata-rata warga penerima bantuan disini juga uangnya di potong sebesar Rp.50.000. Kami juga pernah mendapatkan bantuan berupa sembako yang berisikan beras, intermi, minyak, dan sarden namun isi bantuan tersebut tidak bisa di manfaatkan secara utuh karena hampir setengah dari telur yang diberikan itu sudah tidak bisa di masak (busuk) dan juga sarden nya kecil-kecil hingga jika di goreng dagingnya pun sudah sedikit sekali.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil catatan diatas, dapat ditarik beberapa kesimpulan dan sekaligus sebagai rekomendasi perbaikan kedepan, sebagai berikut;

- Pemerintah Kota Pekanbaru Menutup Rapat Akses Informasi Anggaran Covid19. Informasi anggaran terkait COvid-19 seharusnya penting untuk di buka ke public dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penggunaan covid-19. Pemerintah kota pekanbaru harus memastikan peningkatan kinerja keterbukaan informasi public yang menjadi agenda kinerja pembangunan sebagai tujuan dari pencapaian reformasi birokrasi dan pencapaian good governance
- Pemerintah Kota Pekanbaru belum maksimal melakuakn serapan anggaran penanganan Covid-19. Terhitung desember 2021 pemerintah kota pekanbaru hanya merealisasikan 48% dari total anggaran pencegahan dan penanganan dampak covid-19 sebesar Rp.191 M. Pemerintah kota Pekanbaru harus merealisasikan 100% anggaran pencegahan dan penanganan dampak covid-19
- Memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat menegetahui kapan bantuan social bisa masyarakat terima agar tidak terjadi bantuan social tersebut tidak di ambil oleh masyarakat.
- Data Penerima bantuan yang tidak tepat sasaran dan masih menggunakan data lama, masyarakat yang mampu malah menerima bantuan dibandingkan masyarakat yang tidak mampu. Pemerintah kota Pekanbaru harus mendata ulang masyarakat tidak mampu penerima bantuan agar tepat sasaran.
- Bantuan social tunai harus di berikan sepenuhnya kepada masyarakat Tidak adanya lagi pemotongan bantuan social dengan alasan berdalih administrasi dan lain-lain.

Setahun sudah covid19 mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi. Beragam program dan anggaran telah disalurkan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Lalu bagaimana implementasinya? Catatan ini akan mendeskripsikan bagaimana implementasi program penanganan dampak sosial dan ekonomi. Menitik beratkan pada kebijakan dan program serta kasus-kasus yang ditemukan di Kota Pekanbaru.



Social Media



@FitraProvinsiRiau



Fitra Provinsi Riau



Fitra Riau

Kontak

sekretariat.fitrariau@gmail.com - Email

www.fitrariau.org - Website